KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

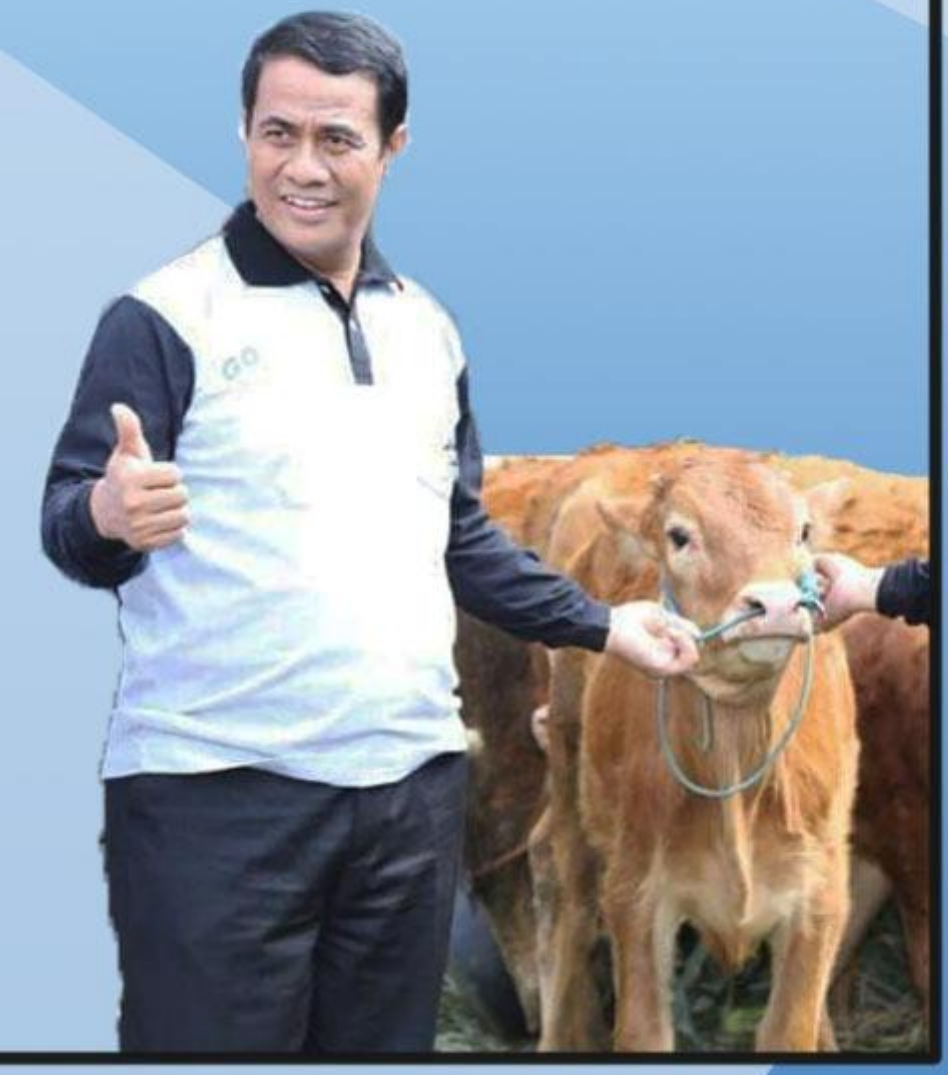

KOMPILASI KLIPING MEDIA CETAK
KEMENTERIAN PERTANIAN RI

08 JUNI 2024

-Biro Humas dan Informasi Publik-

Tittle	Prioritaskan Sapi Lokal untuk Idul Adha
Date	8 Juni 2024
Media	Koran Jakarta
Page	4
Author	Ers/E-10

Kementerian Pertanian

Sektor Peternakan

Prioritaskan Sapi Lokal untuk Idul Adha

JAKARTA - DPR RI mendesak Badan Pangan Nasional (Bapanas) memprioritaskan penggunaan sapi lokal menghadapi Idul Adha pada 17 Juni mendatang. Hal itu seiring dengan rencana Bapanas merealisasikan impor 50 ribu ton sapi atau kerbau untuk memenuhi kebutuhan selama Idul Adha.

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menilai pemerintah seharusnya memaksimalkan serapan dalam negeri. Selama ini, peternak sapi masih banyak mengeluh karena sapinya tidak terbeli.

"Tentu kita berharap bagaimana memaksimalkan dulu serapan dalam negeri karena selama ini kan ada keluhan para peternak kita bahwa sapinya itu tidak terbeli. Nah momentum bulan suci Idul Adha ini momentum untuk memaksimalkan pembelian dari para peternak kita," ujarnya dikutip dari laman resmi DPR RI, Jumat (7/6).

Untuk itu, dia berharap agar rencana impor ini jangan sampai menekan para peternak rakyat. Karena sapi untuk Idul Adha juga harus dipastikan ketentuannya dengan syariat agama. "Jadi saya kira ditelaah, dikaji dan diberikan penjelasan yang meyakinkan kepada masyarakat bahwa impor ini hanya sebagai penambah, kalau memang stok kita dalam negeri kurang, tapi bukan segala-galanya," pungkasnya.

Jelang Hari Raya Kurban atau Idul Adha 1445 Hijriah, secara nasional, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menjamin ketersediaan hewan kurban aman dan mencukupi. Hal tersebut dia sampaikan usai meninjau lokasi kandang sapi hingga pabrik pakan mini milik penggemukan sapi PT. Lembu Setia Abadi Jaya (LSAJ) Farm Tangerang, Banten.

Berdasarkan data Direktortar Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), secara nasional, kebutuhan hewan kurban berada pada angka 1,97 juta ekor, dengan ketersediaannya yang mencapai 2,06 juta ekor, maka ketersediaan hewan kurban tahun ini berpotensi surplus hingga 88 ribu ekor.

Berdasarkan data tersebut, Mentan Amran memastikan jumlah ketersediaan hewan kurban baik sapi, kerbau, kambing maupun domba untuk memenuhi kebutuhan nasional sangat mencukupi bahkan surplus.

Terus Pantau

Lebih lanjut, Mentan menyebut saat ini pihaknya aktif memonitor ketersediaan hewan kurban di seluruh daerah. Tidak hanya sisi ketersediaan, dirinya mengaku juga fokus memastikan dari aspek kesehatan.

Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Peternakan dan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Nasrullah memastikan pihaknya telah melakukan berbagai langkah penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kurban tahun ini.

■ ers/E-10

Dokumentasi
BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Tittle	Warga Harus Peduli Kebersihan Pangan
Date	8 Juni 2024
Media	Koran Jakarta
Page	2
Author	Ant/S-2

Kementerian Pertanian

Hari Keamanan Pangan Sedunia

Warga Harus Peduli Kebersihan Pangan

JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih peduli pada kebersihan pangan demi mewujudkan keamanan pangan dalam memperingati Hari Keamanan Pangan Sedunia setiap 7 Juni.

Plt. Kepala BPOM Rizka Andalucia mengatakan, kebersihan pangan merupakan salah satu hal yang memiliki dampak pengali atau *multiplier effect* yang besar di seluruh dunia. "Secara global sendiri WHO itu memperkirakan sekitar 600 juta orang atau satu dari 10 orang akan menjadi sakit, serta 420.000 jiwa meninggal setiap tahunnya akibat mengonsumsi makanan yang tidak aman, yang terkontaminasi baik oleh senyawa biologi, bakteri, ataupun yang lain-lainnya," katanya melalui gelar wicara yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat (7/6).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kata Rizka, juga memprakirakan lebih dari 110 miliar dolar AS hilang setiap tahunnya untuk menanggulangi kehilangan produktivitas dan beban biaya medis akibat pangan yang tidak aman.

Ia melanjutkan WHO juga menyatakan sebanyak 40 persen perubahan penyakit yang disebabkan oleh panganan yang terkontaminasi terjadi pada anak usia di bawah lima tahun.

Di lingkup Asia Pasifik sendiri, ungkap Rizka, urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang cepat, dibarengi dengan kemunculan teknologi baru dalam pengelolaan makanan dan perubahan kondisi lingkungan turut memicu munculnya ancaman keamanan pangan yang baru.

Adanya kontaminasi bakteri pada suatu makanan, kata dia, juga dapat memengaruhi reputasi suatu negara, yang juga berdampak pada sektor lainnya seperti pariwisata, yang turut menyumbangkan penghasilan pada sebuah negara.

"Oleh karena itu jika tidak diantisipasi dan dikendalikan masalah-masalah tersebut akan menghambat pembangunan sosial dan ekonomi pembangunan sosial," kata Rizka.

Diketahui, tema peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia tahun 2024 adalah "Food safety: prepare for the unexpected" atau "Keamanan pangan: kesiapsiagaan untuk kondisi yang tidak terduga". Tema ini mengingatkan masyarakat dunia akan pentingnya bersiap siaga dalam menghadapi insiden keamanan pangan, tanpa mempedulikan seberapa ringan atau beratnya insiden tersebut. ■ **Ant/S-2**

Dokumentasi
BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Tittle	MENGANTISIPASI VARIAN BARU FLU BURUNG
Date	8 Juni 2024
Media	Bisnis Indonesia
Page	6
Author	Indah Permata Hati

Kementerian Pertanian

| WABAH ZOONOSIS |

MENGANTISIPASI VARIAN BARU FLU BURUNG

Setelah pandemi Covid-19, sektor kesehatan terus mewaspadai kemunculan berbagai patogen menular pada manusia untuk mencegah ancaman wabah berskala global. Salah satu kasus yang diantisipasi adalah temuan varian baru virus flu burung di Amerika Serikat yang diketahui menginfeksi melalui unggas dan sapi.

Indah Permata Hati
redaksi@bisnis.com

Pada April 2024, Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan kasus flu burung H5 menyebabkan seorang pria di Meksiko meninggal dunia. Kini, pasien ketiga telah dikonfirmasi mengalami penyakit yang sebelumnya tak pernah ditemukan menginfeksi manusia ini.

Diketahui, pasien ketiga yang terinfeksi tersebut merupakan pekerja di peternakan sapi perah di Michigan, Amerika Serikat. Pekerja ini tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) saat bekerja.

Seiring dengan diumumkannya kasus ketiga, kewaspadaan negara-negara di dunia akan kemungkinan penularan virus flu burung H5 pun meningkat.

5 Manfaat Kolaborasi dalam Berbisnis Buat Entrepreneur Muda

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah Indonesia juga mulai memperketat pemantauan akan kasus flu burung tersebut.

Kemenkes RI melalui *surveilans one health* melakukan pemantauan kejadian kesakitan dan kematian bersama Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pertanian terkait kasus-kasus penyakit pada satwa liar, hewan ternak, dan manusia yang bisa memicu zoonosis.

"Surveilans genomik juga terus dilakukan selain surveilans Influenza Like Illness (ILI), melihat pada kasus-kasus influenza di tingkat puskesmas," kata Nadia saat dihubungi *Bisnis*.

Nadia menjelaskan, Kemenkes juga terus mengantisipasi dengan melakukan pemantauan, mengingat Indonesia pernah didera kasus flu burung pada 2017 lalu di Bali.

"Sejak kasus flu burung pertama tersebut, kami terus melakukan pemantauan surveilans ini. Badan karantina kesehatan sudah diingatkan untuk memperketat pemantauan di pintu masuk negara, baik bandara, pelabuhan, dan jalur darat," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa pemerikasaan di gerbang masuk Tanah Air diperketat, termasuk pemantauan gejala demam dari wisatawan yang hendak memasuki Indonesia. Mereka akan diperiksa dan diedukasi, serta segera diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat jika gejala demam tinggi disertai dengan sesak napas tidak kunjung berkurang.

Saat ini, Nadia menyebut pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan tertuju pada Dinas Kesehatan tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten.

"Kami juga memastikan rumah sakit siap menjadi rujukan, termasuk soal ketersediaan alat dan sarana untuk penanganan pasiennya," kata Nadia.

GEJALA INFEKSI

Dokter & Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman melihat temuan penting dalam kasus ketiga dikonfirmasinya flu burung H5 di Michigan, Amerika Serikat.

Dicky menyebut gejala awal pasien tersebut mengalami masalah pernapasan seperti batuk setelah terpapar langsung dengan sapi yang terinfeksi.

"Temuan ini adalah pertama kalinya flu burung menyebabkan gejala pernapasan pada manusia, dua sebelumnya hanya mengalami mata merah," katanya.

Menurut Dicky, gejala pernapasan yang dialami pasien tersebut menunjukkan kemungkinan flu burung telah berevolusi dan potensi adanya penyebaran antar manusia baik melalui udara atau droplets.

Kondisi ini perlu menjadi perhatian dunia media, sebba Dicky melihat potensi flu burung menjadi pandemi bisa saja makin dekat dan perlu kewaspadaan khusus.

Meskipun risiko infeksi flu burung bagi masyarakat tergolong rendah, masyarakat dan seluruh *stakeholder* kesehatan perlu menyiapkan langkah pencegahan dan mitigasi.

Dicky menekankan pentingnya menggunakan APD saat berinteraksi dengan hewan yang mungkin terinfeksi.

> **"Temuan ini adalah pertama kalinya flu burung menyebabkan gejala pernapasan pada manusia.**

Kemudian, perlu untuk menghindari kontak langsung atau berkepanjangan dengan hewan yang terinfeksi, atau lingkungan yang sudah terkontaminasi tanpa menggunakan pelindung.

Penyakit terkait virus juga sangat terkait dengan higienitas. Dicky menganjurkan masyarakat untuk rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah berinteraksi dengan hewan atau lingkungan yang terkontaminasi.

Jika memungkinkan, lakukan desinfeksi lingkungan untuk memastikan lingkungan kerja dan alat-alat yang digunakan disterilkan secara rutin.

Tak kalah penting, lakukan pengamatan gejala kesehatan utamanya yang terkait dengan keluhan batuk, demam, hingga mata merah atau masalah konjungtivitis setelah kontak dengan hewan.

Saat pasien terinfeksi, perlu kesadaran untuk melakukan isolasi mandiri dan merantau kesehatan secara rutin. Isolasi mandiri dijalankan untuk mencegah kemungkinan penularan dan melihat pada kondisi dan gejalanya makin memburuk.

Pasien dapat melakukan penggunaan obat antiviral, yakni obat antivirus seperti oseltamivir untuk mengurangi gejala-gejala virus dan mempercepat pemulihan.

Dalam ketiga kasus flu burung tersebut, pasien juga diberikan perawatan dengan pemberian obat oseltamivir.

Gejala batuk dan ketidaknyamanan pada mata (kondisi berair) mulai membaik setelah konsumsi obat dibarengi dengan isolasi mandiri di rumah.

Dalam praktiknya, oseltamivir sudah sering digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi virus influenza tipe A dan tipe B seperti flu burung dari varian sebelumnya.

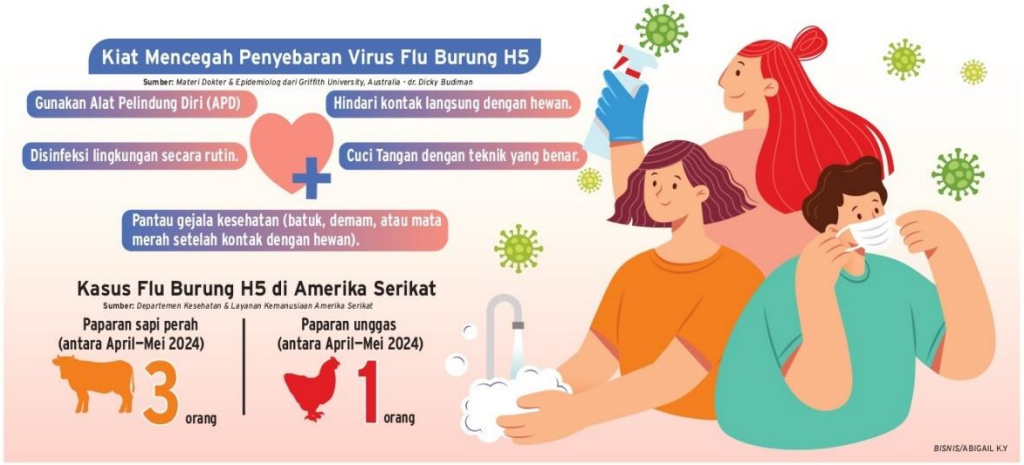

Dokumentasi
BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Tittle	TANIPRENEUR PENGGERAK KOMUNITAS
Date	8 Juni 2024
Media	Bisnis Indonesia
Page	5
Author	Fajar Sidik

Kementerian Pertanian

| WIRAUSAHA PERTANIAN |

TANIPRENEUR PENGGERAK KOMUNITAS

Pada era digital ini, banyak usaha pemula yang sukses berkat kejeliannya melihat persoalan di masyarakat sambil menghadirkan solusi sekaligus menciptakan rantai ekonomi yang kuat berbasis komunitas.

Fajar Sidik
fajar.sidik@bisnis.com

Naluri para entrepreneur muda ini selalu tertantang untuk menggali persoalan di lingkungan sekitar, baik di kalangan pelaku usaha maupun di masyarakat.

Komitmen semacam itu pun coba diterapkan oleh dua pengusaha muda di Malang, Jawa Timur yang menekuni *entrepreneur* pertanian (*tanipreneur*), yaitu Andoni Pridata yang memberdayakan 120 peternakan lebah lewat Sarang Maduku, dan Habib Thabrani, yang aktif mengampanyekan pertanian urban lewat Tanduria.

Ditemui saat Media Gathering Tokopedia di Malang awal Juni ini, Andoni sukses membuat langkah kecil berdampak besar untuk mengangkat skala ekonomi para petani madu lokal yang menghadapi kendala pemasaran pada era digital ini.

Bermula pada 2019, sosok yang akrab disapa Doni ini membuat keputusan besar dengan meninggalkan pekerjaannya di sebuah bank untuk menjadi entrepreneur. Sebagaimana umumnya mantan karyawan yang mencoba peruntungan berwirausaha, Doni memilih usaha berjualan, mulai dari menjajakan durian hingga pakaian gamis. Namun hasil berjualan secara konvensional itu tidak sesuai harapan.

Pengalaman awal itu pun cukup menantang jiwa kewirausahaannya untuk menciptakan peluang bisnis lain yang bernilai tambah serta berkelanjutan. Pada titik itu, Doni melihat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penghasil madu lebah terbesar di dunia, tapi mayoritas peternak lokal masih terkendala masalah klasik. Misalnya, beberapa petani yang ditemuinya menghadapi keterbatasan dalam pemasaran, sehingga hasil produksinya tidak dapat diserap secara optimal. "Sebagian petani ada yang menyimpan madunya hingga berbulan-bulan. Padahal kualitas madu mereka murni," katanya saat menerima kunjungan media bersama Tokopedia di Malang, Senin (3/6).

Bisnis/Fajar Sidik

> **Selain membuat konten edukasi tentang ciri-ciri madu murni, kami juga memvalidasinya dengan hasil uji lab.**

Dari situlah, Doni melihat peluang untuk mendukung pemasaran petani lokal di wilayahnya. Awal 2020, menjadi tonggak baru baginya untuk menekuni peternakan lebah madu. Tentu saja, setiap fase awal pasti membutuhkan ongkos pembelajaran, di mana Doni menelan kerugian hingga puluhan juta karena kesalahan saat memilih mitra peternak.

Namun Doni tidak menyerah. Dia melanjutkan usaha membangun bisnis dengan modal seadanya. "Saya ingat sisa modal saat itu sekitar Rp500.000. Lalu dibelikan kotak sarang lebah itu seharga Rp50.000, dan hanya dapat 10 kotak," ujarnya.

Kali ini keberuntungan mulai berpihak. Hasil produksi madu bersama dua mitra petani lokal hanya sekitar 125 liter sebulan ternyata dapat diserap pasar. Bahkan permintaannya melonjak drastis bersamaan dengan merebaknya Covid-19 yang melanda sejak Maret 2020.

Jawara Farm, Berdayakan Masyarakat Desa lewat Peternakan

Selain berkembangnya kesadaran publik akan manfaat madu untuk daya tahan tubuh dan mempercepat penyembuhan Covid-19, Doni pun membuat sejumlah inisiatif untuk meyakinkan konsumen tentang kualitas madu produksinya.

Dengan memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Doni membentuk tim kreator konten yang menceritakan tetek bengek peternakan lebah dan produksi madu, hingga menggaet ahli gizi. "Tantangan pemasaran produk madu adalah meyakinkan konsumen akan kemurniannya. Selain konten tentang ciri-ciri madu murni, kami juga memvalidasinya dengan hasil uji lab."

Berkat konsistensinya membuat konten edukasi, serta upayanya memperkuat pemasaran melalui *e-commerce*, kini Doni mampu meraup omzet jumbo.

Tidak hanya dinikmati sendiri, omzet itupun melibatkan 120 mitra peternak lebah lokal termasuk di Malang, Kediri, Pati, hingga Jambi dengan produksi mencapai lebih dari 30 ton madu sebulan. "Ada 33 varian produk madu yang dihasilkan dari lebah ternak, lebah hutan, dan lebah klanceng. Penjualan terbesar dari *e-commerce* dengan omzet sekitar Rp2 miliar per tahun."

URBAN FARMING

Sementara itu, Habib Thabrani, Founder Tanduria, komunitas bisnis pertanian yang aktif mengampanyekan *urban farming* melalui TikTok dan media sosial lainnya, menyoroti isu ketahanan pangan.

Menurutnya, Tanduria, terdiri dari kata tandur alias mengolah tanah dan kata ceria, hadir untuk mengajak masyarakat agar mencintai kegiatan berkebun sebagai bagian dari gaya hidup. "Khususnya untuk warga perkotaan, dapat memanfaatkan halaman rumah, area atap dan lahan kosong lainnya untuk berkebun. Setidaknya hasil menanam itu dapat dikonsumsi sendiri," katanya, Selasa (4/6).

Dengan mengandalkan konten video, Thabrani bersama bersama 8 rekannya konsisten berbagi pengalaman tentang bercocok tanam dengan konsep berkelanjutan. Pria yang akrab disapa Mas Bon ini mengaku butuh 11 bulan untuk membangun Taduria hingga dapat menghasilkan. Namun, setelah melewati masa sulit, mulai terbuka berbagai peluang bisnis seiring membesarnya komunitas *urban farming* yang mengikutinya.

Saat ini, Tanduria mampu menjual perlengkapan berkebun, termasuk media tanam, bibit, hingga pupuk organik cair. Ada juga buku tutorial dan kursus *online* (*e-course*) dengan target untuk masyarakat luas. "Penjualan paling banyak dari pupuk cair bisa ribuan liter per bulan. Adapun omzet rata-rata Rp300 juta, dan pada puncaknya bisa mencapai Rp500 juta sebulan."

Berkat konsistensinya, saat ini Tanduria memiliki komunitas urban farming berjumlah 4.000 anggota. "Kami menyasar masyarakat nonpetani agar mau menggeluti *urban farming*. Tapi ada juga mitra petani di Poncokusumo Malang, Pasuruan, Batu, dan Berastagi.

Pada kesempatan itu, Nuraini Razak, E-Commerce Communications Director Shop Tokopedia mengatakan bahwa pihaknya terus mendukung pelaku UMKM lokal agar dapat memaksimalkan peluang bisnis lewat pemanfaatan teknologi.

"Saat ini, ada sekitar 21 juta penjual di Tokopedia dan Shop Tokopedia yang menjangkau 99% kecamatan di Indonesia. Melihat potensi itu, kami menggencarkan deretan inisiatif untuk mendorong perkembangan para pelaku usaha lokal."

Beberapa inisiatif tersebut a.l menggencarkan promo seperti *double date* hingga kampanye Beli Lokal yang mengusung produk-produk merek UMKM agar bisa menjangkau pasar lebih luas.

Dokumentasi
BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Tittle	GERAKAN TANAM CABE
Date	8 Juni 2024
Media	Rakyat Merdeka
Page	14
Author	Antara Foto/Irwansyah Putra

Kementerian Pertanian

ANTARA FOTO/IRWANSYAH PUTRA/TOM

GERAKAN TANAM CABE: Penjabat Wali Kota Banda Aceh, Amiruddin (kanan) melihat tanaman cabe yang dikembangkan kelompok tani wanita, usai meresmikan gerakan tanam cabe di Kantor Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DP2KP) Kota Banda Aceh, Aceh, Jumat (7/6/2024). Program nasional gerakan tanam cabe yang digagas Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian itu diharapkan menjadi solusi mengatasi kenaikan harga dan kelangkaan pasokan serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan maupun lahan terlantar.

Dokumentasi
BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Tittle	Menperin Genjot Kualitas SDM Industri Alat Berat
Date	8 Juni 2024
Media	Rakyat Merdeka
Page	7
Author	NOV

Kementerian Pertanian

Produksi Meningkat Setiap Tahun

Menperin Genjot Kualitas SDM Industri Alat Berat

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong peningkatan produksi industri alat berat. Hal ini seiring dengan tumbuhnya permintaan di berbagai sektor dalam mendukung pembangunan infrastruktur serta pengolahan bidang pertambangan dan perkebunan.

BERDASARKAN data Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (Hinabi), produksi alat berat dalam negeri mencapai 8.066 unit pada tahun 2023.

Produksi tahun lalu menjadi capaian kedua terbanyak sepanjang sejarah, setelah tahun 2022 yang menghasilkan hingga 8.826 unit.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, untuk memacu produk alat berat yang inovatif dan berdaya saing, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) industri yang kompeten.

Menurutnya, industri alat berat merupakan salah satu sektor industri yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, produk industri ini dibutuhkan oleh sektor pertambangan, infrastruktur, serta sektor perkebunan dan pertanian.

"Hal ini sejalan dengan upaya menjalankan kebijakan hilirisasi," kata Agus dalam keterangannya, Jumat (7/6/2024).

Dilanjutkan Agus, untuk memenuhi kebutuhan SDM industri alat berat yang terampil, Kemenperin terus memperkuat dan mengembangkan program pendidikan vokasi melalui kerja sama dengan industri. Peran ini dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI).

"Kami terus berupaya memaksimalkan peran dalam menyusun peraturan dan kebijakan yang mendukung ekosistem vokasi berjalan dengan baik," ujar Agus.

Seiring dengan upaya yang dilakukan Kemenperin, Kepala BPSDMI Kemenperin Masrokhan juga meminta agar industri alat berat membuka diri dan terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi.

"Kami terus melakukan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi, sesuai dengan tuntutan pasar kerja di

Agus Gumiwang Kartasasmita

sektor industri. Salah satunya melalui Politeknik Sekolah Tinggi Manajemen Industri (STMI) Jakarta," ujar Masrokhan.

Menurutnya, unit pendidikan Kemenperin telah menyelenggarakan program setara Diploma 1 untuk program studi manufaktur alat berat, dari hasil kerja sama antara BPSDMI Kemenperin dengan PT Komatsu Indonesia.

"Ini wujud nyata penyelenggaraan pendidikan vokasi Kemenperin yang berkolaborasi dengan pelaku industri dalam negeri," ujar Masrokhan.

Dia menjelaskan, program kolaborasi dengan industri ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan industri alat berat, sehingga lulusannya nanti bisa menjadi tenaga-tenaga terampil yang akan berkontribusi pada peningkatan kinerja industri alat berat nasional.

"Ini *link and match* yang harus dibangun antara dunia pendidikan vokasi dengan industri," katanya.

Tidak hanya industri alat berat, BPSDMI juga telah menyelenggarakan Program Diklat *3 in 1* industri pengolahan kopi.

Dalam program ini, peserta diklat bisa mendapatkan tiga manfaat sekaligus. Yakni dilatih, disertifikasi dan ditempatkan pada industri yang membutuhkan.

Kemenperin mengimplementasikan pola pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pembekalan keterampilan bagi para tenaga kerja, yang didasarkan pada kebutuhan industri pengolahan kopi saat ini.

Salah satu program Diklat 3 in 1 yang dilaksanakan adalah "*Upskilling* Pengolahan Kopi untuk IKM", yang digelar di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 3-9 Juni 2024. Kabupaten tersebut merupakan salah satu daerah penghasil kopi Robusta dan Arabika.

Wilayah penghasil kopi di Bantaeng tersebar di Kecamatan Tompobulu, Eremerasa, Bantaeng, Sinoa dan Uluere.

Selain untuk memenuhi kebutuhan industri, pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi sistem 3 in 1 ini merupakan wujud nyata kolaborasi yang dilakukan antara Pemerintah dengan industri.

Program pelatihan ini terlaksana atas sinergi dan peran aktif sejumlah pihak, mulai dari pemerintah, mitra industri dan asosiasi serta masyarakat pada umumnya.

"Kepada semua pihak yang terlibat, terutama kepada mitra industri dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), kami sampaikan terima kasih atas dukungan dan kerja samanya dalam pelaksanaan kegiatan Upskilling Pengolahan Kopi Untuk IKM," tutur Kepala Pusdiklat SDM Industri Kemenperin Saiful Bahri.

Seperti diketahui, Indonesia merupakan salah satu penghasil terbesar kopi di dunia. Data Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) menyebutkan, Indonesia menjadi produsen kopi terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Vietnam. ■ NOV

Dokumentasi
BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Tittle	Suku Awyu & Moi Didukung Netizen
Date	8 Juni 2024
Media	Rakyat Merdeka
Page	5
Author	SSL

Kementerian Pertanian

Munculkan Tagar All Eyes On Papua

Suku Awyu & Moi Didukung Netizen

PASCA *All Eyes On Rafah* viral di media sosial X, kini giliran *All Eyes On Papua* yang jadi *trending topic*. Banyak netizen yang menyorot nasib Suku Awyu dan Suku Moi di Papua, yang hutan adatnya diduga diserobot oleh perusahaan cangkang untuk kepentingan kebun sawit.

Di media sosial X, poster bertuliskan All Eyes On Papua beredar luas. Poster itu menampilkan gambaran animasi wajah orang Papua lengkap dengan pakaian adatnya. Gambaran wajah itu dilengkapi dengan gambar banyak bola mata berbagai warna.

Tokoh Adat Suku Awyu Hendrikus Woro menyatakan, terancamnya hutan adat Suku Awyu dan Suku Moi oleh perusahaan sawit merupakan sebuah pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM). Sebab, hak dan tanah ulayat dilindungi oleh sejumlah aturan perundang-undangan.

"Tempat kami terancam oleh perusahaan atau investasi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kami korban pelanggaran HAM. (Tanah) itu mutlak hak kami," ujar Hendrikus dalam keterangannya di Jakarta, Jum'at (7/6/2024).

Menurut dia, Suku Awyu dan Suku Moi menggelar aksi di depan Gedung Mahkamah Agung (MA) di Jakarta, Senin (27/5/2024). Mereka menggelar aksi damai untuk mengaspirasikan penolakan, sembari mengenakan baju adat.

"Aksi tersebut kami lakukan setelah gugatan di pengadilan tingkat pertama dan kedua gagal. Kini, gugatan kami masuk ke tahap kasasi, harapan terakhir masyarakat adat Papua dalam mempertahankan hutan adat," harapnya.

Terpisah, Direktur Wahid Institute Yenny Wahid menegaskan dukungannya kepada perjuangan Suku Awyu dan Suku Moi, yang mempertahankan kedaulatan tanah ulayat mereka dari ekspansi perusahaan besar.

Menurut dia, jika hutan adat itu dibabat untuk sawit, Suku Awyu dan Suku Moi akan kesulitan mencari makan.

"Selama ini, mereka bergantung pada hutan dan menjaganya sebagai warisan nenek moyang. Hutan adatnya mau dibabat, mereka akan sulit cari makan, emisi karbon yang dilepas juga banyak banget," ujar Yenny melalui akun X miliknya.

Putri Presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini juga mengapresiasi perjuangan Suku Awyu dan Suku Moi, yang melakukan perjalanan selama 48 jam demi menyampaikan aspirasi mereka di Jakarta.

Yenny Wahid

"Sekarang Suku Awyu dan Moi lagi berjuang mempertahankan hutan adat mereka. Kemarin, mereka datang jauh dari Boven Digoel dan Sorong ke Jakarta, untuk ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung," kata Yenny.

Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Solayen Murib Tabuni menjelaskan, perusahaan yang diprotes Suku Awyu dan Moi adalah PT IAL. Pihaknya memberikan izin lingkungan kepada PT IAL pada 2021.

Selain itu, sambung Solayen, Dinas Penanaman Modal juga telah menerbitkan izin usaha perkebunan (IUP) kepada PT IAL. Dia menegaskan, SK perizinan itu karena sudah melalui tahapan panjang, serta sesuai dengan aturan yang ada dan berlaku.

"Ada persetujuan bupati setempat, rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hingga Dinas Perkebunan. Kami di sini melayani apa pun yang disodorkan. Semua sudah mereka lalui, baru bawa ke sini," jelasnya.

Di media sosial X, perjuangan Suku Awyu dan Moi membela hutan adat mereka mendapat dukungan netizen.

"Dengan segala hormat, Pemerintah Pusat tolong rakyat Papua. Hidup sudah capek, terima kasih," cuit akun *@amdhwk18*.

Akun *@Mythicalforest* mempertanyakan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, yang tidak mengecek data yuridis dan lapangan, sebelum memberikan izin kebun sawit. Dia meyakini, bila pengecekan dilakukan, izin tersebut tidak akan terbit, karena di lokasi itu ada hutan adat.

"Suku Awyu dan Suku Moi pemilik sah hutan adat. Jangan dirampas! Ingat, dunia sedang menghadapi isu krisis iklim dan perlindungan hak masyarakat adat. Jangan semua diinjak-injak demi kepentingan korporasi ekstraktif!," tegasnya. ■ SSL

BIRO H UBLIK

Tittle	Dorong Produksi Pertanain Puluhan Poktan Dapat Bantuan Mesin Traktor
Date	8 Juni 2024
Media	Bandung Ekspres
Page	6
Author	Bbs/ris

Kementerian Pertanian

Dorong Produksi Pertanian, Puluhan Poktan Dapat Bantuan Mesin Traktor

PURWAKARTA - Untuk mendukung capaian produksi pertanian khususnya di wilayah Kabupaten Purwakarta, Pemkab setempat melalui Dinas Pangan dan Pertanian menyerahkan bantuan alat mesin pertanian berupa mesin traktor untuk membajak sawah kepada kelompok tani di wilayah tersebut.

"Hari ini kita menyerahkan sebanyak 33 unit hand traktor roda dua bantuan dari Kementerian Pertanian kepada perwakilan kelompok tani di Kabupaten Purwakarta. Tujuan bantuan traktor ini tentunya untuk membantu mempercepat pengolahan tanah para petani agar tidak tertinggal masa tanam," ujar Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta, Sri Jaya Midan.

Dalam agenda serah terima alat dan mesin pertanian traktor roda dua yang digelar di Kantor Dispangtan Kabupaten Purwakarta, Kamis 06 Juni 2024 itu tampak hadir Penjabat Bupati Purwakarta, Benni Irwan yang menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan kelompok tani.

Lebih lanjut, Sri Jaya Midan berharap pada musim panen ke depan atau diperkirakan pada bulan Oktober 2024 target capaian produksi padi akan meningkat. "Musim panen kemarin terjadi minus sekitar 2.800 ton, ke depan target sasaran kita adalah 3.600 ton, kita optimis target itu bisa tercapai," ujarnya.

Selain itu, Kadispangtan juga mengungkapkan, ke depan bantuan lain dari pemerintah juga akan diajukan secara bertahap, seperti bantuan benih. Dari luas lahan tanam sekitar 17.900 hektar, dan yang telah dibantu barus sekitar 6.000 hektar.

"Secara bertahap nanti sesuai dengan anggaran dan arahan dari Kementerian termasuk traktor bukan hanya 33 unit, nanti anggaran Kementerian akan terus bertambah akan di usulkan juga termasuk pompa alkon. Sekarang baru 123 unit, kalau petani membutuhkan kita akan usulkan lagi termasuk program-program yang lain irigasi usaha tani dan lainnya," kata Midan.

Menurutnya, dampak elnino kemarin mengakibatkan masa tanam terjadi minus diangka 2.800 ton dan tahun ini targetnya 3.670 ton dan sudah terealisasi 2.900 ton. "Artinya, ini sudah 77 persen dari minus tersebut sudah terpenuhi dari program percepatan ini. Alhamdulillah kita selalu di support oleh Pak Penjabat Bupati. InsyaAllah dalam rangka percepatan ini," ujarnya.

Sementara itu, kata Midan, tanaman juga perlu perawatan juga perlu pengamanan dari organisme pengganggu tumbuhan. "Kita sudah fasilitasi tinggal prosesnya saja itu ada dua drone untuk pengendalian OPT, nanti jika terjadi serangan hama penyakit secara masif kita akan gunakan itu," ujarnya.

Menutup, Sri Jaya Midan mengatakan, ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat diharapkan mampu menekan angka inflasi di daerah. Karena dengan jaminan ketersediaan pangan maka harga-harga bisa terkendali dan bisa dijangkau masyarakat.

"Ketersediaan pangan di daerah juga merupakan salah satu cara untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Untuk itu, diperlukan juga alat-alat mesin pertanian. Nah dalam hal ini pemerintah hadir untuk para petani dan kelompok tani," pungkas Sri Jaya Midan. **(bbs/rie)**

Dokumentasi
BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Tittle	Pemerintah Bakal Update Data Penerima Pupuk Bersubsidi
Date	8 Juni 2024
Media	Bandung Ekspres
Page	6
Author	Bandung Ekspres

Kementerian Pertanian

FOTO : ISTIMEWA

PENDATAAN : Pemerintah membuka ruang untuk update data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) setiap empat bulan sekali. Periode pertama dimulai tanggal 5 hingga 18 Juni 2024.

Pemerintah Bakal Update Data Penerima Pupuk Bersubsidi

Periode Tiap Empat Bulan

JAKARTA - Pemerintah membuka ruang untuk update data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) setiap empat bulan sekali. Periode pertama dimulai tanggal 5 hingga 18 Juni 2024.

Bagi petani yang belum bisa mendapatkan pupuk bersubsidi karena tidak terdata di RDKK 2024, ruang ini adalah momen untuk mendaftar ke dalam RDKK dengan menghubungi penyuluh di wilayah kecamatannya masing-masing. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh di Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Tri Wahyudi menegaskan bahwa, salah satu poin penting dari perubahan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 menjadi Permentan 01/2024 yaitu data RDKK dapat dievaluasi di tahun berjalan atau setiap caturwulan sekali. Sedangkan di beleid sebelumnya data ini tidak bisa diubah di tahun berjalan.

"Update yang dijadwalkan hingga tanggal 18 Juni mendatang adalah update perdana. Ini merupakan kesempatan bagi petani yang belum masuk RDKK agar bisa ter-input. Untuk itu segera hubungi penyuluh terdekat yang ada di setiap kecamatan," tandas Tri Wahyudi kembali.

Adapun syarat petani agar bisa terdata di RDKK dan menjadi penerima manfaat pupuk bersubsidi, sesuai Permentan 01/2024 mereka harus menggarap lahan maksimal 2 hektare dan tergabung dengan Kelompok Tani (Poktan). Petani juga melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan padi, jagung, dan kedelai, serta subsektor tanaman hortikultura cabai, bawang merah, dan bawang putih, dan subsektor perkebunan tebu rakyat, kakao, dan kopi.

Ia menambahkan, update RDKK yang saat ini dilakukan Pemerintah tidak hanya meng-input petani yang sebelumnya tidak terdata di RDKK. Tapi petani juga bisa menambahkan luas lahan dan pupuk pada musim tanam tertentu yang sebelumnya tidak masuk dalam RDKK.

"Untuk dua perubahan ini akan ada verifikasi dan persetujuan berjenjang, sampai dengan kepala dinas pertanian setempat," ujar Tri Wahyudi.

Update selanjutnya adalah penambahan volume pupuk bagi NIK Eksisting yang telah terdaftar dengan batas maksimal dosis rekomendasi. Update terkahir, untuk pembaruan volume pupuk organik bagi NIK eksisting yang telah terdaftar sesuai dosis rekomendasi wilayah.

"Permentan 01/2024 juga menambah jenis pupuk yang disubsidi, yaitu memasukkan kembali pupuk organik ke dalam skema subsidi. Sebelumnya pupuk yang disubsidi hanyalah Urea, NPK dan NPK formulasi khusus kakao," ujarnya.

Lebih lanjut, Tri Wahyudi juga menjelaskan jika Pemerintah juga memberikan kemudahan pada proses penebusan pupuk bersubsidi. Petani cukup datang ke kios dan membawa KTP. Apabila petaninya berhalangan datang ke kios untuk bertransaksi, penebusan sudah bisa diwakilkan oleh keluarga atau kelompok tani dengan membawa surat kuasa.

Perubahan kebijakan di Permentan 01/2024 ini memudahkan bagi petani yang mungkin sudah lanjut usia (lansia) atau terkendala transportasi sehingga tidak memungkinkan datang ke kios. Ini juga sekaligus menjadi solusi bagi petani yang alih lahan.

Sementara untuk memudahkan penebusan, Pupuk Indonesia juga melengkapi kios dengan aplikasi iPubers. Aplikasi ini hasil sinergi antara Pupuk Indonesia dengan Kementerian Pertanian. Disampakkqn Tri Wahyudi, kemudahan yang diperoleh petani, karena Pupuk Indonesia juga memperbaiki sistem di kios melalui aplikasi iPubers. **(*)**

Dokumentasi
BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Tittle	Petani Bisa Tanam Padi Tiga Kali
Date	8 Juni 2024
Media	Tribun Kaltim
Page	12
Author	M17

Kementerian Pertanian

Petani Bisa Tanam Padi Tiga Kali

Pemerintah Berupaya Swasembada Beras

TANJUNG SELOR, TRIBUN - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat, produksi beras pada Januari - April 2024 diperkirakan mencapai 9.772 ton. Mengalami kenaikan sebesar 335 ton atau 3,55 persen. Kenaikan ini dibandingkan dengan produksi beras di Kaltara pada Januari-April 2023 yakni sebesar 9.437 ton beras.

Produk beras ini total dari produksi beras sebanyak 4.543 ton pada bulan Januari 2024. Kemudian ditambah dengan potensi produksi beras sepanjang Februari hingga April 2024, sebesar 5.229 ton.

Kepala BPS Kaltara Mas'ud Rifai menyebut bahwa potensi produksi beras pada Subround Januari-April 2024 diperkirakan mencapai 9.772 ton. Prediksi peningkatan tersebut menjadi sinyal positif bagi Kalimantan Utara. Mengingat pada tahun 2023, produksi beras pada untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 13.992 ton, mengalami penurunan sebanyak 4.109 ton atau 22,70 persen dibandingkan produksi beras di 2022 sebesar 18.101 ton.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Utara, Heri Rudiyono menjelaskan, perluasan areal tanam menjadi upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada beras. Implementasi melalui berbagai program yang bermuara pada peningkatan jumlah produksi.

> **Kami menargetkan petani yang biasa tanam sekali bisa menjadi dua kali yang biasa tidak tanam harus tanam yang sudah dua kali tanam, bisa menjadi tiga kali**
>
> **HERI RUDIYONO**
> Kepala DPKP Kaltara

"Kami menargetkan petani yang biasa tanam sekali bisa menjadi dua kali yang biasa tidak tanam harus tanam yang sudah dua kali tanam, bisa menjadi tiga kali. Jadi, tidak terpaku pada penambahan lahan tanam baru," kata Heri.

Implementasi lainnya berupa optimalisasi lahan pertanian dengan mendorong petani menggunakan benih unggul dan bersertifikat. Serta program pompanisasi di sawah tadah hujan dan pembuatan tanggul di sawah pasang surut.

"Saya target dalam tiga tahun ke depan sudah bisa swasembada. Kita semua tentu berharap agar target ini terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama," harapnya.

DOK.TRIBUNKALTARA.COM

PRODUKSI NAIK - Ilustrasi. Lahan pertanian di Kaltara. Produksi padi atau beras mengalami kenaikan pada awal 2024 ini.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kementan) Nomor 243 tahun 2024, target perluasan areal tanam di Kaltara pada tahun ini 5.300 hektare. Di mana, mayoritas atau sekitar 2.300 hektare berada di Kabupaten Bulungan.

DPKP Kaltara, juga melaksanakan program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) untuk 1000 hektare. Implementasi program ini memberi pelatihan kepada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Babinsa. Sebelum mereka melakukan pendampingan ke petani.

"Pertemuan dalam satu kali musim tanam bisa enam kali, PPL dan teman-teman Babinsa akan melatih para kelompok tani sekaligus praktek langsung. Besok pembekalannya untuk mereka," ujarnya.

Di sisi lain, Heri sudah mengajukan beberapa program lain ke Kementan RI. Di antaranya optimasi lahan, pemanfaatan lahan tidur, peningkatan prioritas lahan, program pompanisasi, program pembuatan tanggul, penambahan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Program yang tidak kalah penting untuk diperjuangkan Heri adalah optimalisasi lahan. Teknisnya dengan memberikan dana ke kelompok tani untuk kegiatan pengelolaan lahan mereka. Mulai dari perbaikan pematang, pembelian bibit, pembelian saprodi dan lainnya. **(m17)**

Dokumentasi
BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Tittle	Kehadiran Bursa CPO Bikin Harga TBS Makin Stabil
Date	8 Juni 2024
Media	Koran Kontan
Page	10
Author	Sabrina Rhamadanti

Kementerian Pertanian

Kehadiran Bursa CPO Bikin Harga TBS Makin Stabil

JAKARTA. Kehadiran bursa minyak sawit alias bursa *Crude Palm Oil* (CPO) yang terbentuk pada 13 Oktober 2023 cukup berdampak terhadap stabilitas dan peningkatan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung yang mengatakan, harga TBS di tingkat petani cukup stabil sejak terbentuknya bursa CPO, kendati kenaikannya belum terlalu signifikan.

"Ya, harga terdongkrak sedikit. Mungkin karena baru Oktober (resmi bursa CPO), jadi baru enam sampai tujuh bulan. Tapi yang pasti, harga CPO ini tidak begitu fluktuasi lagi, dulu kan pernah Rp 11.000 per kilogram (kg) terus tiba-tiba Rp 6.000," jelas Gulat, Kamis (6/6).

Begitupun dengan pergerakan harga TBS di tingkat petani. Sama seperti harga CPO, fluktuasi harga TBS tidak begitu naik turun terlalu dalam seperti sebelum terbentuknya bursa CPO. Harga yang relatif stabil tersebut cukup menguntungkan petani sawit.

"Selama ini kan kami hanya berkiblat pada PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN), itu kan bukan bursa, itu tender terbatas," jelasnya.

Sebagai tambahan informasi, bursa CPO kini telah diikuti oleh 35 perusahaan CPO. Data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyebut, nilai transaksi untuk kontrak perdagangan CPO Futures (CPOTR) kini telah mencapai 1.930 lot atau setara 9.650 metrik ton. Saat ini, terdapat 133 jenis kontrak CPO lokal yang diperdagangkan.

Sabrina Rhamadanti

Dokumentasi
BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Tittle	Sulsel Kekurangan Cadangan Pangan
Date	8 Juni 2024
Media	Tribun Timur
Page	7
Author	Faq

Kementerian Pertanian

Sulsel Kekurangan Cadangan Pangan

MAKASSAR, TRIBUN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menjamin kebutuhan pangan di tengah ancaman kekeringan dan El-Nino.

Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Ketapang Sulsel Kemal Redindo Syahrul Putra.

Saat ini, Pemprov Sulsel memiliki cadangan pangan beras di angka 110 ton.

"Sampai hari ini kami punya stok sekitaran 110 ton. Sebelumnya 140 ton tapi sudah disuplai bantuan bencana kemarin, kira-kira kita tinggal 110 ton cadangan beras," jelas Kemal Redindo , Jumat (7/6).

Kemal mengaku angka ini hanya ada di pemerintah provinsi.

Sementara itu pemerintah kabupaten/kota juga memiliki stok cadangan pangan sendiri.

"Kabupaten/kota punya cadangan pangan sendiri khususnya beras," katanya.

Meski begitu, Kemal mengaku masih tetap akan menambah cadangan pangan.

Setidaknya akan ada serapan cadangan pangan 80 ton.

Serapan ini disebutnya berasal dari produksi dalam negeri.

"Tahun ini kami dinas ketahanan pangan akan menambah stok cadangan pangan pemerintah 80 ton disesuaikan anggaran dan harga yang ada," katanya.

Kemal menjamin Sulsel telah siap menghadapi perubahan iklim saat ini.

Hal ini belajar dari cara Sulsel mampu menjaga produksi beras di tahun 2024 lalu.

"Kalau menghadapi kekeringan besok, Sulsel tidak jadi masalah karena dalam data neraca kami, selalu surplus di Sulsel," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh juga sudah siap menghadapi kondisi tersebut.

Solusi untuk menjaga produksi pertanian sudah dirumuskan memanfaatkan bantuan Kementrian Pertanian (Kementan).

Ribuan pompa air disebar ke 24 Kabupaten/kota.

"Kita sudah ada bantuan dari kementrian pertanian 3.149. Itu akan dioptimalkan kerjasama dengan kodam dipasang ke 24 kab/kota mengatasi kekeringan," jelas Prof Zudan pada Jumat (7/6).

Pompa air ini akan diselaraskan dengan pembuatan sumur bor.

Selain itu bisa memanfaatkan air sungai untuk dialirkan ke area persawahan.

"Iya (sumur bor) dengan pompa itu yang 3.149," katanya.

Saat ini bantuan pompa air Kementan sudah di tangan Pemprov Sulsel serta pemerintah kabupaten/kota.

Siapkan Cadangan

Pemerintah Sulsel mengingatkan agar pemerintah kabupaten kota menyiapkan cadangan pangan. Di tingkat provinsi, Pemprov juga sedang berupaya meningkatkan jumlah cadangan pangan. Idealnya jumlah cadangan pangan di Sulsel adalah 400 ton.

"Kita masih butuh 360 ton dan ini telah disetujui oleh Bapak Pj Gubernur Sulsel untuk dilakukan pengembangan," kata Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, April lalu.**(faq)**

Dokumentasi
BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Tittle	Kementan Jamin Suplai Hewan Kurban Cukup
Date	8 Juni 2024
Media	Investor Daily
Page	12
Author	TI

Kementerian Pertanian

Kementan Jamin Suplai Hewan Kurban Cukup

JAKARTA, ID–Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Iduladha 2024 aman dan mencukupi. Berdasarkan data Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, kebutuhan hewan kurban nasional 1,97 juta ekor, ketersediaannya 2,06 juta ekor, artinya suplai tahun ini bisa surplus hingga 88 ribu ekor.

Merujuk informasi itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan hewan kurban, baik sapi, kerbau, kambing, maupun domba, untuk memenuhi kebutuhan nasional sangat mencukupi, bahkan surplus. "Persiapan pasokan hewan kurban insyaallah aman, cukup sampai Iduladha nanti, saya sudah terima laporannya dan aman, jumlahnya sangat cukup," ungkap Amran usai meninjau lokasi kandang sapi hingga pabrik pakan mini milik penggemukan sapi PT Lembu Setia Abadi Jaya (LSAJ) Farm Tangerang pada 6 Juni 2024.

Dalam keterangan yang dikutip Jumat (07/06/2024), Kementan kini aktif memonitor ketersediaan hewan kurban di seluruh daerah. Tidak hanya dari sisi ketersediaan, Kementan juga fokus memastikan dari aspek kesehatan. Dirjen PKH Kementan Nasrullah, saat mendampingi Mentan Amran, memastikan, pihaknya telah melakukan berbagai langkah penting guna menjamin kelancaran pelaksanaan kurban tahun ini. "Kami pastikan sertifikat kesehatan ternak yang dilalulintaskan sudah lengkap, memeriksa *ear tag* untuk menjamin ternak telah teregister, dan menerjunkan petugas kesehatan hewan di kabupaten/kota guna rutin mengecek penampungan ternak," tutur dia.

Pada bagian lain, Kementan melakukan optimalisasi upaya peningkatan produksi beras di tengah sejumlah tantangan yang kini dihadapi dan berdampak ke penurunan hasil 2023. Seperti dilansir *Antara*, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan Dedi Nursyamsi mengatakan, dampak kemarau panjang 2023 menurunkan signifikan produksi beras nasional menjadi 30,2 juta ton dari tahun sebelunnya 31,5 juta ton. Padahal, kebutuhan beras domestik per bulan 2,6 juta ton, setara 5,2 juta ton gabah kering giling (GKG) atau areal luas panen 1 juta hektare (ha). Pada Maret dan April 2024, luas tanam di RI kurang dari 1 juta ha, yakni hanya 800-900 ribu ha. "Artinya, Juni ini, luas tanam kita tidak boleh kurang dari 1,1 juta ha," papar dia.

Dalam upaya menaikkan luas tanam, Kementan menyiapkan program strategis, yakni optimalisasi lahan rawa, pompanisasi di lahan sawah tadah hujan, dan tumpang sisip padi gogo di lahan perkebunan. Di sawah tadah hujan, padi ditanam sekali setahun akibat tidak ada air saat kemarau, Kementan meningkatkan luas tanam dengan mengalirkan air dari air permukaan terdekat ke persawahan. Guna mendorong program strategis itu, Kementan melatih jutaan petani, penyuluh pertanian, dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) melalui Gerakan Antisipasi Darurat Pangan Nasional. **(tl)**

BIRO ... BLIK

Tittle	125 Hewan Tidak Layak Kurban
Date	8 Juni 2024
Media	Radar Tasikmalaya
Page	4
Author	Riz

Kementerian Pertanian

125 Hewan Tidak Layak Kurban

CIAMIS, RADSIK – Menjelang Hari Raya Idul Adha Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Ciamis melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang dijual di pasaran (ante mortem). Hasilnya sebanyak 125 hewan dinyatakan tidak layak kurban. Terdiri dari 109 ekor sapi, 9 ekor domba dan 7 ekor kambing.

Ketua Tim Kerja Subtansi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Budiono mengatakan total jumlah hewan kurban yang diperiksa mencapai 554 ekor. Dari jumlah itu 429 ekor saja yang dinyatakan lolos pemeriksaan serta dianggap layak.

"Hasil pemeriksaan per Rabu (5/6/2024) kemarin terdapat 554 ekor hewan kurban se-Kabupaten Ciamis. Dengan yang lolos 429 ekor dan tidak lolos 125 ekor," tandasnya pada Jumat (7/6/2024).

Standar kelayakan hewan kurban sendiri sudah diatur oleh pemerintah dan juga agama. Salah satunya lewat Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban. Yaitu hewan kurban harus sehat, cukup umur, tidak cacat, dan jenisnya tidak boleh betina yang masih produktif.

Hewan kurban yang lolos pemeriksaan dan boleh dijual oleh para pedagang kemudian dibubuhi tanda huruf S dan diberi sertifikat surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) untuk kurban. "Hewan lolos pemeriksaan dapat dijual dengan memiliki cap S pada bokong hewan dan surat keterangan kesehatan kurban dari Disnakan Kabupaten Ciamis," ujarnya.

Sedangkan untuk hewan kurban yang dinyatakan tidak lolos pemeriksaan salah satu kendalanya adalah faktor usia yang belum memenuhi syarat. "Sedang untuk penyakit hewan kurban sementara tidak ada temuan. Seperti Penyakit mulut dan kuku (PMK) dan lain-lain," katanya.

Setelah pemeriksaan Ante Mortem atau sebelum penyembelihan, berikutnya akan dilakukan pemeriksaan Post Mortem. Yaitu memeriksa daging hewan kurban yang telah disembelih. Hal ini untuk memastikan tidak ada cacing pita atau sejenisnya pada daging hewan kurban yang disembelih. Pemeriksaan ini juga meliputi kesehatan karkas, daging, dan organ lainnya.

"Disnakan untuk pengecekan hewan kurban sampai aman dikonsumsi. Tentunya agar bagian jeroan layak konsumsi atau bebas dari cacing yang biasa menempel pada usus atau hati hewan," ujarnya. **(riz)**

Dokumentasi
BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Tittle	Perbaikan Dampak Kerusakan Butuh Rp 16T
Date	8 Juni 2024
Media	Rakyat Sumbar
Page	1 Part 1
Author	Rakyat Sumbar

Kementerian Pertanian

Perbaikan Dampak Kerusakan Butuh Rp 1,6 T

Status Tanggap Darurat 9 Juni Berakhir, Pencarian Korban Dihentikan

TIM LIPUTAN
Harian Rakyat Sumbar

Berdasarkan usulan dari seluruh pemerintah kabupaten kota kepada pemerintah pusat, untuk perbaikan dampak kerusakan bencana banjir bandang, banjir lahar dingin dan longsor yang menimpa sejumlah daerah di Sumbar butuh anggaran mencapai Rp1,6 triliun.

"**TOTAL** anggaran ini juga termasuk perbaikan kerusakan yang ditimbulkan akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi pada 7 hingga 8 Mei lalu di sejumlah kabupaten kota di Sumbar," sebut Sekdaprov Sumbar Hansastri saat memberikan keterangan pers, di Kantor Dinas Kominfotik Sumbar, Jumat (7/6).

Ia mengatakan, untuk status tanggap darurat bencana banjir bandang, banjir lahar dingin dan longsor di tiga daerah, Kabupaten Agam, Tanahdatar dan Kota Padangpanjang yang terjadi 11 Mei lalu, status tanggap darurat yang ditetapkan Pemprov Sumbar berakhir 9 Juni mendatang.

"Awalnya ditetapkap status tanggap darurat bencana banjir bandang, banjir lahar dingin dan longsor di Provinsi Sumbar dari 13 Mei hingga 26 Mei, kemudian dilakukan perpanjangan status darurat dari 27 Mei hingga 9 Juni 2024 ini," jelasnya pada kegiatan yang dihadiri sejumlah Kepala OPD Pemprov Sumbar.

Ia menyampaikan, data terakhir, korban bencana yang meninggal sebanyak 63 orang akibat bencana banjir bandang, banjir lahar dingin dan longsor tersebut. Sebanyak 60 terindifikasi dan tiga belum terindifikasi. Total korban yang masih dilakukan pencarian sebanyak 10 orang.

Rinciannya korban akibat banjir bandang, lahar dingin dan tanah longsor di Kabupaten Agam sebanyak 24 orang meninggal dunia, di Tanahdatar 32 orang, Padangpanjang 2 orang, dan di Kota Padang akibat longsor sebanyak 2 orang.

Lebih lanjut, ia menjelaskan saat ini sudah 27 hari pencarian dilakukan korban banjir bandang lahar dingin Marapi yang terjadi 11 Mei lalu. Teman-teman tim di bawah koordinasi Basarnas masih lakukan pencarian. Dimana masih terdapat 10 korban di Kabupaten Tanahdatar yang dinyatakan hilang belum ditemukan.

» Baca **Perbaikan**... di hal 2

Dokumentasi
BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Tittle	Perbaikan Dampak Kerusakan Butuh Rp 16T
Date	8 Juni 2024
Media	Rakyat Sumbar
Page	1 Part 2
Author	Rakyat Sumbar

Kementerian Pertanian

Perbaikan Dampak...

Sambungan dari hal 1

"Sebanyak 8 keluarga korban sudah mengikhlaskan, dua keluarga korban lagi sedang dilakukan koordinasi dengan pihak keluarga untuk mengikhlaskan. Karena setelah status tanggap darurat berakhir 9 Juni, kita akhiri pencarian korban," terangnya.

Ia menyampaikan, selain korban meninggal, juga terdapat 4.064 orang yang mengungsi akibat bencana alam yang terjadi tersebut. Kondisi terakhir korban terdampak bencana di pengungsian sudah kembali ke rumah masing-masing.

"Mereka tidak ada lagi di tenda-tenda pengungsian, tetapi mengungsi ke tempat keluarga. Dengan kondisi ini maka dapur umum yang telah didirikan sudah diakhiri. Namun, masih ada beberapa dapur umum yang masih berdiri di tingkat nagari," jelasnya.

Bencana banjir bandang dan lahar dingin Marapi menyebabkan di Kabupaten Agam terdapat 213 unit rumah rusak ringan, 42 unit rumah rusak sedang, 61 rumah rusak berat dan 31 rumah hanyut. Di Kabupaten Tanahdatar, 64 rumah rusak ringan, 19 rumah rusak sedang, 127 rumah rusak berat dan 43 unit rumah hanyut. Di Padangpanjang 5 rumah rusak ringan, 3 rumah rusak sedang dan 8 rumah rusak berat.

"Relokasi rumah di rawan bencana, rumah yang hanyut tidak dibangun lagi di lokasi yang sama. Tapi disediakan tempat baru. Relokasi untuk korban bencana banjir bandang dan banjir lahar dingin di Kabupaten Agam masih dalam kajian tim dimana lokasi lahan relokasi bagi korban bencana ditetapkan," jelasnya.

Sementara itu, untuk Kabupaten Tanahdatar atas permintaan dari pemerintah kabupaten sudah ada lahan yang cocok untuk dilakukan relokasi. Ada tanah aset Pemprov Sumbar yang layak disediakan, yakni di Rambatan.

"Aset tanah ini sudah diserahkan seluas 3,6 hektar untuk membangun 150 rumah bagi warga terdampak banjir bandang dan banjir lahar dingin di Kabupaten Tanahdatar. Lahan ini status tanahnya masih punya Dinas Pertanian Sumbar. Pemprov Sumbar sudah menyiapkan administrasi untuk bisa di pakai relokasi," terangnya.

Hansastri menyampaikan terimakasih atas dukungan penanganan selama status tanggap darurat dari pemerintah pusat cukup besar. Di mana Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M hadir langsung dan tinggal sekian hari bersama lengkap dengan deputi di lokasi bencana. Juga ada kunjungan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang membawa bantuan langsung kepada korban bencana.

Termasuk juga kunjungan sejumlah menteri. Yakni, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Pertanian, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, Menteri Pertahanan. Termasuk juga kunjungan Ketua PMI, Kepala Basarnas, Kepala BMKG, Kepala Badan Pangan Nasional, Istri Panglima TNI dan Staf.

"Penanggulangan bencana melibatkan banyak pihak. Karena itu, kita mengucapkan terimakasih atas bantuan dan perhatian, kerja keras dan kordinasi yang dilakukan seluruh pihak. Mulai dari Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), para menteri, kepala lembaga, kepala dan pengurus organisasi terkait. Termasuk TNI/ Polri, Tim SAR, relawan, masyarakat dan berbagai pihak yang bekerja keras di lapangan," jelasnya. **(cr2/mul)**

Dokumentasi
BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Tittle	Pemerintah Rombak Penerima Pupuk Subsidi
Date	8 Juni 2024
Media	Pos Kota
Page	9
Author	Ham

Kementerian Pertanian

Pemerintah Rombak Penerima Pupuk Subsidi

♦ Perombakan Data Petani Subsidi Dilakukan Setiap 4 Bulan Mulai 5-18 Juni

JAKARTA (Poskota) - Pemerintah akan membuka ruang untuk update data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) setiap empat bulan sekali. Dengan demikian, para petani yang belum kebagian pupuk bersubsidi dapat bernafas lega.

Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh mengatakan, periode pertama dari update data ini dimulai tanggal 5 sampai dengan 18 Juni 2024.

Petani yang belum mendapatkan pupuk bersubsidi karena tidak terdata di RDKK 2024 bisa memanfaatkan ruang ini untuk mendaftar ke dalam RDKK dengan menghubungi penyuluh di wilayah kecamatannya masing-masing.

Menurutnya, salah satu poin penting dari perubahan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 menjadi Permentan 01/2024 ialah data RDKK dapat dievaluasi di tahun berjalan atau setiap caturwulan sekali. Sedangkan di beleid sebelumnya, data ini tidak bisa diubah di tahun berjalan.

"Update yang dijadwalkan hingga tanggal 18 Juni mendatang adalah update perdana. Ini merupakan kesempatan bagi petani yang belum masuk RDKK agar bisa ter-input. Untuk itu segera hubungi penyuluh terdekat yang ada di setiap kecamatan," kata Tri Wahyudi, dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/6/2024).

Agar bisa terdata di RDKK dan menjadi penerima manfaat pupuk bersubsidi, petani perlu memenuhi beberapa syarat. Sesuai Permentan 01/2024, petani tersebut harus menggarap lahan maksimal 2 hektar dan tergabung dengan Kelompok Tani (Poktan).

Poskota/ist

Pemerintah membuka ruang untuk update data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) setiap empat bulan sekali.

Selain itu, petani juga harus masuk ke dalam kategori usaha tani subsektor tanaman tertentu, seperti pangan padi, jagung, atau kedelai. Selain itu juga subsektor tanaman hortikultura cabai, bawang merah, dan bawang putih, ataupun subsektor perkebunan tebu rakyat, kakao, dan kopi.

Tambah Luas Lahan

Di samping itu, update RDKK yang saat ini dilakukan Pemerintah tidak hanya menginput petani yang sebelumnya tidak terdata di RDKK. Petani juga bisa menambahkan luas lahan dan pupuk pada musim tanam tertentu yang sebelumnya tidak masuk ke dalam RDKK.

"Untuk dua perubahan ini akan ada verifikasi dan persetujuan berjenjang, sampai dengan kepala dinas pertanian setempat," imbuhnya.

Update selanjutnya adalah penambahan volume pupuk bagi NIK eksisting yang telah terdaftar dengan batas maksimal dosis rekomendasi. Berdasarkan informasi terakhir, pembaruan volume pupuk organik bagi NIK eksisting yang telah terdaftar sesuai dosis rekomendasi wilayah.

"Permentan 01/2024 juga menambah jenis pupuk yang disubsidi, yaitu memasukkan kembali pupuk organik ke dalam skema subsidi. Sebelumnya pupuk yang disubsidi hanyalah Urea, NPK dan NPK formulasi khusus kakao," ujarnya.

Pemerintah juga memberikan kemudahan pada proses penebusan pupuk bersubsidi yaitu petani cukup datang ke kios dan membawa KTP. Apabila petani berhalangan datang ke kios untuk bertransaksi, penebusan sudah bisa diwakilkan oleh keluarga atau kelompok tani dengan membawa surat kuasa.

Perubahan kebijakan di Permentan 01/2024 ini memudahkan bagi petani yang mungkin sudah lanjut usia (lansia) atau terkendala transportasi sehingga tidak memungkinkan datang ke kios. Ini juga sekaligus menjadi solusi bagi petani yang alih lahan.

Sementara untuk memudahkan penebusan, Pupuk Indonesia juga melengkapi kios dengan aplikasi iPubers. Aplikasi ini hasil sinergi antara Pupuk Indonesia dengan Kementerian Pertanian. **(*/ham)**

Dokumentasi
BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Tittle	Cetak Sawah Rakyat demi Swasembada Pangan
Date	8 Juni 2024
Media	Radar Sampit
Page	2
Author	Ant

Kementerian Pertanian

ANTARA/HO-PUSPEN KEMENDAGRI

MOU: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menandatangani nota kesepahaman mengenai progam cetak sawah rakyat di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Jumat (7/6).

Cetak Sawah Rakyat demi Swasembada Pangan

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) menandatangani memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman mengenai program cetak sawah rakyat untuk mewujudkan swasembada pangan.

Kegiatan yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Perluasan Areal Tanam ini berlangsung di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Jumat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara beriklim tropis sangat berpeluang mewujudkan swasembada pangan ketimbang negara lain yang memiliki empat musim.

Tito menilai visi dan misi Kementan dalam mewujudkan swasembada pangan merupakan langkah yang luar biasa dan patut mendapatkan apresiasi.

"Kita bisa sepanjang tahun, kita cukup air, kita memiliki tanah yang subur, lebih dari 100 volcano, dan banyak sekali sebetulnya peluang tenaga kerja lagi cukup banyak untuk mewujudkan harapan dari visi Pak Mentan itu," kata Tito dalam keterangannya.

Mendagri menegaskan bahwa swasembada pangan bukan persoalan mudah karena harus melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah (pemda).

Menurut dia, ada beberapa langkah strategis yang perlu diperhatikan pemda untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Pertama, pengembangan infrastruktur pertanian. Kedua, pelatihan dan pengembangan kapasitas petani. Ketiga, diversifikasi pertanian dan nilai tambah. Keempat, kolaborasi dan kemitraan. Kelima, pemantauan dan evaluasi.

"Kami harus mengajak semua daerah ini semua paralel bekerja, mendongkrak pertanian wilayahnya masing-masing, kemudian dari pemerintah pusat memberikan dukungan dorongan memetakan mana yang perlu mendapat dukungan dan mana yang tidak," tegasnya.

Terkait dengan anggaran pertanian, Tito menerangkan bahwa pemda dapat memanfaatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan dana transfer dari pemerintah pusat.

Ia lantas mencontohkan pemda dengan PAD yang kuat seperti Banten dapat mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk membuat beragam program pertanian.

Sementara itu, daerah dengan PAD rendah, kata dia, perlu intervensi dari pemerintah pusat agar dapat meningkatkan sistem pertanian di wilayah masing-masing.

"Nah, daerah-daerah (dengan PAD rendah) ini memang harus dibantu karena uangnya sudah habis buat belanja pegawai, operasional pegawai, yang wajib tadi pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar sehingga pertanian, ya mereka tidak punya uang," pungkas Tito. **(ant)**

BIRO HU PUBLIK

Tittle	Harga Masih Ditahan Pemerintah
Date	8 Juni 2024
Media	Tribun Medan
Page	4
Author	Kontan.co.id

Kementerian Pertanian

Harga Masih Ditahan Pemerintah

MENTERI ESDM Arifin Tasrif mengatakan, revisi Perpres 191 Tahun 2014 ini mengatur tentang mekanisme subsidi energi yang akan selesai pada Juni 2024.

Saat ini harga BBM masih ditahan oleh pemerintah, terutama harga BBM yang ditahan sampai Juni dengan pertimbangan pemerintah karena kondisi yang masih baru pulih (Covid) sehingga tidak ingin membebankan masyarakat.

Terlebih, urgensi mempercepat revisi Perpres ini untuk mengantisipasi dampak dari situasi geopolitik dan ketegangan global yang saat ini tengah berlangsung. Untuk itu, pembengkakan subsidi BBM dan konflik Iran-Israel yang berkepanjangan salah satunya bisa diatasi dengan mervisi Perpres tersebut.

Arifin berharap setidaknya pada kuartal II-2024 ini, revisi Perpres 191/2014 bisa dirampungkan. Lebih lanjut, Arifin bilang penyaluran BBM bersubsidi ini memang perlu ditertibkan menyusul kondisi harga minyak yang tinggi dan akan menjadi beban APBN.

Pasalnya, Indonesia masih mengimpor minyak dari berbagai negara secara total 840 ribu barel per hari (bph), di antaranya impor minyak mentah 240 ribu bph dan BBM 600 ribu bph.

Konflik Timur Tengah antara Israel dan Iran yang kembali memanas bakal mendorong lonjakan harga minyak. Pasalnya, Iran merupakan salah satu produsen minyak mentah terbesar di dunia.

Iran menyumbang sekitar 3,3% pasokan global dan memproduksi 2,4 juta barel minyak per hari. Pada 2023, Iran menjadi sumber pertumbuhan pasokan terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. **(kontan.co.id)**

Dokumentasi
BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Tittle	Warga melihat
Date	8 Juni 2024
Media	Harian Jogja
Page	1
Author	Antara/Didik Suhartono

Kementerian Pertanian

Antara/Didik Suhartono

Warga melihat sapi kurban di sentra penjualan hewan kurban di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (7/6). Kementerian Pertanian mencatat pasokan hewan kurban untuk Iduladha 2024 mencapai 2,06 juta ekor yang terdiri dari sapi, kerbau, kambing, dan domba di seluruh Indonesia. Kebutuhan hewan kurban secara nasional sebanyak 1,97 juta ekor.

Dokumentasi
BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN